

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagai upaya menjalankan tugasnya dalam hal penggerakkan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada masyarakat, para penyuluh keluarga berencana (PKB) dan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) sudah melakukan aktivitas *public relations* baik secara langsung kepada masyarakat atau pun melalui perantara kader. Dalam hal ini, aktivitas *public relations* berupa komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah disampaikan kepada kader yang nantinya membantu para petugas lapangan ini dalam mensosialisasikan dan menggerakkan masyarakat supaya berpartisipasi aktif untuk mensukseskan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melihat perkembangan aktivitas *public relations* yang dilakukan PKB/ PLKB dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggungjawab keberlangsungan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Garut, peneliti menggunakan alat analisis, yaitu dengan menggunakan model proses Manajemen *Public Relations* Cutlip, Center dan Broom. Model ini dijadikan arahan peneliti dalam penelitian, adapun dapat diuraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Para PKB/ PLKB mendefinisikan masalah yang telah ataupun tengah terjadi di wilayah kerjanya sebelum melakukan aktivitas *public relations* kepada

masyarakat. Tujuan utama dari aktivitas *public relations* ini adalah untuk mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil pengamatan, kegiatan wawancara dengan beberapa pihak terkait, ditambah dengan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Bisa dikatakan kinerja PKB/ PLKB pada tahun 2020 ini sudah cukup baik, terutama untuk aspek pergerakan masyarakat supaya menjadi akseptor KB, pelayanan alat kontrasepsi, dll. Untuk aspek ini sudah berhasil, para PKB/ PLKB yang bertugas di Kecamatan Karangpawitan ini cukup piawai dan terampil untuk berkomunikasi dengan calon akseptor, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, petugas puskesmas, dll sebagai mitra kerjanya. Begitu pula silaturahmi yang baik terjalin dengan para kader yang merupakan kepanjangan tangan para petugas lapangan KB ini. Namun, ternyata keberhasilan penggerakkan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini tidak komprehensif, yakni, ada salah satu turunan program, yaitu program GenRe (Generasi Berencana) yang menyasar remaja dan PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) sebagai wadah organisasinya yang belum berhasil. Ketidakberhasilan ini bisa dilihat dari sisi kuantitas, yaitu hanya terdapat 4 PIK-R di seluruh Kecamatan Karangpawitan, dan dari sisi kualitas, PIK-R ini tidak bisa menjalankan organisasinya dengan baik.

2. Para PKB/ PLKB memiliki rencana teknis untuk menerjemahkan target capaian program yang telah ditetapkan oleh pihak DPPKBPPPA sebagai penanggungjawab utama program pengendalian penduduk dan keluarga

berencana di Kabupaten Garut. Dalam aspek perencanaan, para PKB/ PLKB ini memiliki rencana kerja tahunan, rencana kerja bulanan dan mingguan. Rencana ini pun kemudian disesuaikan kembali dengan keadaan dan kebutuhan terkini sesuai petunjuk dari pihak dinas. Di samping itu, mereka pun memiliki jadwal pelaksanaan aktivitas *public relations* kepada masyarakat, seperti jadwal kunjungan di Posyandu tingkat RW, rapat rutin, pertemuan dengan kader, dll. Dalam aspek perencanaan dan penyusunan program, para PKB/ PLKB ini tidak dalam kapasitas untuk menyusun program sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Perencanaan untuk hal ini menjadi wewenang penuh DPPKBPPPA. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, diketahui bahwa pihak dinas pada prinsipnya mengakomodir bila ada masukan dari para petugas lapangan ini. Bila tidak ada berarti dinas mencoba menyimpulkan dari hasil evaluasi capaian program bulanan yang bersumber dari para PKB/PLKB. Selama tahun 2020 terdapat beberapa kegiatan yang berbentuk pelatihan dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keilmuan serta kualitas keterampilan berkomunikasi para petugas lapangan (PKB/PLKB).

3. PKB/ PLKB yang bertugas di Kecamatan Karangpawitan telah melakukan tindakan dan mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020 sudah cukup baik. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan tupoksi kerja dinas yang banyak, para PKB/ PLKB ini menjadi komunikator utama untuk menyampaikan informasi program kepada masyarakat. Sese kali para petugas lapangan ini memberdayakan para

kader untuk menjadi komunikator dalam pelaksanaan aktivitas *public relations* untuk mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pelaksanaan aktivitas *public relations* ini diimplementasikan melalui berbagai kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, Posyandu menjadi tempat favorit para PKB/ PLKB ini untuk mencari calon akseptor KB. Dengan alasan tempat itu banyak dikunjungi kaum ibu dan balitanya, Posyandu menjadi tempat KIE yang praktis dan efektif untuk melakukan *public relations*. Selain itu, para PKB/ PLKB ini melakukan rapat internal di Balai Penyuluh KB tingkat Kecamatan. Dalam rapat ini mereka membahas sejauh mana perkembangan target dan sasaran di tingkat desa. Seringkali terjadi diskusi yang cukup hangat untuk mencari solusi apabila terjadi permasalahan teknis di lapangan. Ada juga aktivitas *public relations* yang dilakukan bersama-sama kader, biasanya tempat pertemuannya di balai sawala kampung KB, mereka bersama-sama berdiskusi program dan mengkonfirmasi jumlah calon akseptor hasil kegiatan KIE yang akan dilayani di Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya. Jadi bentuk aktivitas *public relations* dalam mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini ada yang melalui komunikasi tatap muka dengan beberapa orang, atau melakukan komunikasi massa seperti pada saat pertemuan di balai sawala kampung KB. Sesekali PKB/ PLKB ini melakukan KIE program GenRe (Generasi Berencana) kepada anak remaja yang akan disiapkan untuk menjadi anggota PIK-R. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, aktivitas *public relations* ini sangat terbatas, frekuensinya tidak sesering kepada para kaum ibu di Posyandu.

4. Dalam upaya pelaksanaan aktivitas *public relations* untuk mengkomunikasikan program pengendalian penduduk dan keluarga tahun 2020, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA) Kabupaten Garut beserta para PKB/ PLKB melakukan evaluasi secara berkala dengan cukup baik. Dari hasil evaluasi program menunjukkan bahwa pelaksanaan aktivitas *public relations* produktif menghasilkan akseptor baru dan terpeliharanya akseptor lama supaya menjadi pelanggan setia program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Namun, untuk turunan program lainnya, yaitu penggerakkan program GenRe (Generasi Berencana) capaiannya belum memuaskan. Hal ini disebabkan hanya ada 4 PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) di seluruh wilayah Kecamatan Karangpawitan yang luas ini. Dari sisi kualitas pun anak-anak remaja yang tergabung dalam PIK-R ini kurang memahami tugas dan fungsi mereka dalam organisasi tersebut. Tentu saja ini menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh para PKB/ PLKB mengingat tugas mereka bukan hanya mengurus atau melayani para akseptor alat kontrasepsi KB, tetapi anak-anak remaja pun menjadi sasaran program yang tidak terpisahkan. Tentu saja, anak-anak remaja ini bukan diajak untuk menjadi akseptor KB melainkan diberikan komunikasi, edukasi, dan informasi tentang kesehatan reproduksi, penyiapan berkeluarga bagi remaja, pembangunan berwawasan kependudukan dan pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

5.2 Saran

5.2.1 Saran Teoritis

Saran teoritis dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk memperluas pengembangan ilmu komunikasi terutama program kajian *Public Relations*, diharapkan model proses Manajemen *Public Relations* ini dapat menjadi pisau analisis ke dalam permasalahan penelitian lainnya dengan objek penelitian yang berbeda. Khususnya objek penelitian yang berhubungan langsung dengan *Public Relations*, dikarenakan implementasi model proses manajemen ini diperlukan oleh praktisi PR untuk membuat program publik dalam rangka mempengaruhi pemikiran, sikap dan perilaku publik sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang berkembang dalam lingkup organisasi atau perusahaan tertentu.
2. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan agar mengkaji lebih detail aktualisasi pelaksanaan *public relations* dalam mengkomunikasikan program generasi berencana kepada remaja dan *stakeholder* terkait baik di lingkungan masyarakat atau institusi Pendidikan terutama dalam pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).

5.2.2 Saran Praktis

Saran praktis dari penelitian ini diantaranya:

1. Analisis SWOT (*Strenght, Weakness, Opportunity, Threat*) dapat dilakukan oleh PKB/ PLKB dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBPPPA)

Kabupaten Garut supaya mampu mendefinisikan masalah sehingga dapat menentukan pendekatan, metode dan strategi komunikasi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan aktivitas *public relations* untuk mencapai hasil sebaik mungkin terutama untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Kecamatan Karangpawitan.

2. PKB/ PLKB diharapkan untuk mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dengan tidak hanya berkonsentrasi pada sektor pencapaian akseptor semata, tetapi mulai untuk membagi porsi secara seimbang dengan mendekati dan membina remaja, membentuk dan mengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja secara intensif, memberikan bimbingan, memantau berjalannya roda organisasi. PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) guna mencapai target minimal 1 desa 1 Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R).
3. Penguatan advokasi kepada bupati dan DPRD juga perlu dilakukan oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) selaku penanggungjawab utama program pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Garut. Advokasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang program pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada pimpinan daerah sekaligus meminta dukungan mereka untuk menerbitkan regulasi yang mewajibkan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di tingkat desa atau di lingkungan Pendidikan.